

DINAMIKA GEOPOLITIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI RIVALITAS GLOBAL DI KAWASAN INDO-PASIFIK: STUDI KASUS LAUT NATUNA UTARA

Indria Putri Khoirunnisa^{1*}, Alsyia Maulan², Zaenul Slam³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Manajemen Pendidikan, Tangerang Selatan

Email: indriaptr07@gmail.com ; alsvamaulan17@gmail.com ; zaenul_slam@uinjkt.ac.id

Abstract

Geopolitics is the study of political phenomena from a geographical perspective. On the other hand, the Natuna Sea is often the site of various issues concerning Indonesia's maritime privacy, such as territorial violations by foreign vessels, illegal fishing, and unauthorized exploration activities. In this study, the author examines the global political dynamics faced by Indonesia in responding to international competition, particularly by using the North Natuna Sea as a case study. This research aims to provide insight and understanding of Indonesia's Geopolitical Dynamics in Facing Global Rivalry. This research uses a qualitative approach, library research methods by collecting and utilizing research materials from relevant previous research sources such as newspapers, magazines, books, and journal articles that are relevant and accountable, then presented in descriptive form. The results of the study indicate that Indonesia implements a strategy of assertive diplomacy through ASEAN, increased naval patrols or joint exercises to prevent violations, and economic diplomacy to protect energy resources. These steps will effectively maintain maritime claims while balancing competing major powers, although continuous multilateral engagement is important for maintaining long-term stability. In conclusion, Indonesia's proactive approach is a powerful example of geopolitics in disputed waters, and provides lessons for security dynamics in the Indo-Pacific.

Keywords: *Geopolitics, North Natuna Sea, Indonesian Sovereignty, Citizenship*

Abstrak

Geopolitik merupakan studi yang mempelajari fenomena politik dari segi geografi. Di sisi lain, Laut Natuna sering menjadi tempat munculnya berbagai permasalahan terhadap privasi maritim Indonesia, seperti pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal asing, penangkapan ikan secara ilegal serta aktivitas eksplorasi tanpa izin. Pada studi ini penulis meneliti dinamika politik global yang dihadapi Indonesia dalam menanggapi persaingan internasional, terutama dengan menjadikan Laut Natuna Utara sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memberi wawasan dan pemahaman mengenai Dinamika Geopolitik Indonesia dalam Menghadapi Rivalitas Global tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan menggunakan bahan penelitian dari sumber penelitian terdahulu yang relevan seperti koran, majalah, buku, dan artikel jurnal relevan yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi diplomasi tegas melalui ASEAN, peningkatan patroli Angkatan laut atau latihan gabungan untuk mencegah pelanggaran, serta diplomasi ekonomi untuk melindungi sumber daya energi. Langkah-langkah ini dengan baik akan menjaga klaim maritim sambil menyeimbangkan kekuatan besar yang bersaing, meskipun keterlibatan multilateral yang terus menerus penting untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Sebagai kesimpulan, pendekatan proaktif Indonesia merupakan contoh kuat dalam geopolitik di perairan yang menjadi sengketa, dan memberikan pelajaran bagi dinamika keamanan di Indo-Pasifik.

Kata kunci: *Geopolitik, Laut Natuna Utara, Kedaulatan Indonesia, Kewarganegaraan*

A. Pendahuluan

Laut Natuna Utara adalah area laut penting bagi Indonesia yang memiliki banyak kekayaan sumber daya alam. Daerah ini rentan terhadap sengketa karena adanya klaim wilayah yang mengakibatkan tumpang tindih, terutama dari China dengan peta *nine-dash line*. Klaim yang dilakukan satu pihak ini berlawanan dengan hak kedaulatan Indonesia terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982 (Sasono, 2026). Sehingga situasi ini menimbulkan adanya ancaman terhadap kedaulatan maritim di Indonesia serta dibutuhkan respon pertahanan yang efektif, adaptif, dan *sustainable*.

Berdasarkan peta *nine-dash line* Tiongkok pada penelitian UNCLOS 1982, mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang tentunya bertentangan dengan hukum internasional, terutama konvensi hukum laut PBB. Indonesia secara tegas menolak klaim tersebut dan tetap mempertahankan haknya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna yang diakui secara internasional. Meskipun begitu, Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa Laut China. Ketegangan ini tetap berdampak pada kedaulatan Indonesia, terutama dengan semakin banyaknya kapal-kapal Tiongkok yang melakukan aktivitas ilegal di area ZEE Indonesia, seperti penangkapan ikan tanpa izin dan eksplorasi energi secara ilegal (Sandrina Dewi & Wira Atman, 2025).

Konflik di Laut Natuna Utara lebih dari sekadar perdebatan tentang batas laut. Hal ini melibatkan isu yang lebih kompleks terkait kedaulatan, pengaruh regional, dan persaingan kekuasaan di area Indo-Pasifik. Pada tahun sekitar 2021 dan 2023, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-

kapal asing, terutama kapal penjaga pantai dan kapal ikan yang dikawal oleh aparat keamanan China, menunjukkan adanya peningkatan yang tajam. Di tahun 2021, situasi menjadi semakin tegang ketika Indonesia mulai melakukan pengeboran minyak dan gas di Blok Tuna, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia dekat dengan Laut Natuna. Tindakan ini ditentang oleh China, yang mengirimkan kapal Coast Guard untuk mendekati lokasi pengeboran dan mengawal kapal nelayan China yang beroperasi secara ilegal di area tersebut (Villia et al., 2026). Sementara itu pada penelitian lain, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam menyediakan fasilitas radar pesisir dan sonar yang dibutuhkan oleh armada patroli. Keterbatasan ini diperhatikan baik dari segi jumlah maupun jangkauan yang merujuk pada sasaran MEF tahap III 2020-2024 (Haerulloh & Martani, 2023). Sehingga menghasilkan hipotesis yaitu Indonesia mampu menangani persaingan global di Laut Natuna Utara dengan upaya memadukan atau mengkombinasikan diplomasi yang tegas, peningkatan hukum militer yang kuat, serta perlu kolaborasi ekonomi untuk mengamankan lingkungan tanpa memicu konfrontasi secara langsung.

Berdasarkan informasi dari SKK Migas, kawasan Laut Natuna memiliki simpanan gas yang terkonfirmasi mencapai 222 triliun kaki kubik (Tcf), yang mayoritas terletak di Blok East Natuna. Besaran ini menjadikan Laut Natuna salah satu daerah dengan simpanan gas terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai kemungkinan mencapai USD 20-30 miliar. Di sisi lain, jumlah cadangan minyaknya diperkirakan melebihi 500 juta barel, dengan nilai sekitar USD 35-45 miliar, tergantung pada perubahan harga di pasar internasional. Selain sumber energi fosil, Laut Natuna juga memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang meliputi berbagai jenis ikan dengan nilai ekonomi tinggi, seperti

tuna sirip kuning, cakalang, dan kerapu yang menjadikan perairan ini sangat berarti bagi industri perikanan nasional. Wilayah perairan ini berkontribusi sekitar 9-12% dari total hasil tangkapan perikanan di negara ini, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai IDR 20 triliun per tahun (Sandrina Dewi & Wira Atman, 2025).

Adapun dikerahkan TNI Angkatan Laut berfungsi penting dalam memastikan keamanan. Pelaksanaan strategi pertahanan laut meliputi patroli secara teratur, pengawasan dengan dukungan teknologi seperti radar dan Sistem Pemantauan Kapal, serta kerjasama antar lembaga. Upaya ini merupakan strategi awal dalam merespon aktivitas ilegal. Kemungkinan terjadinya konflik dan tindakan melanggar kedaulatan bisa dikurangi dengan adanya TNI AL di lautan (Sasono, 2026).

Atas dasar hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana Indonesia mengelola dinamika geopolitiknya dalam menghadapi rivalitas global di kawasan Indo-Pasifik melalui studi kasus Laut Natuna Utara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai bagaimana penelitian ini dapat menambah dimensi baru dalam perbincangan geopolitik dengan perspektif terkini, mendorong penguatan upaya perlindungan melalui pendekatan yang beragam dan berkesinambungan. Topik ini tidak hanya penting untuk Indonesia, tetapi juga bagi situasi keamanan di ASEAN secara komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru serta pengembangan ilmu di bidang hubungan internasional termasuk studi *geopolitik* di kawasan Indo-Pasifik.

B. Metode

Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari metodologi penelitian kepustakaan. Pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian pustaka yang diterapkan karena isu atau topik yang diteliti yakni dinamika *geopolitik* Indonesia dalam menghadapi rivalitas global di Kawasan Indo-Pasifik dengan studi kasus Laut Natuna Utara memiliki sifat yang konseptual dan memerlukan analisis yang mendalam terhadap narasi tersebut. Dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode utama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang konseptual dan interpretative mengenai dinamika *geopolitik* dengan studi kasus Laut Natuna. Data penelitian didapatkan dan dikumpulkan dari artikel atau jurnal ilmiah yang sesuai, termasuk publikasi akademis di jurnal terkemuka. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi materi (Wanditadiva, 2025). Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam diskusi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam mengembangkan strategi yang lebih terarah dan dapat bertahan menghadapi perubahan yang semakin rumit di kawasan Indo-Pasifik.

C. Hasil dan Pembahasan

Dinamika Geopolitik Kawasan Indo-Pasifik

Dinamika keamanan di wilayah Indo-Pasifik telah menarik perhatian dari Mitra Eksternal untuk menjalin kolaborasi dalam sektor pertahanan bersama ASEAN serta berusaha menjaga posisi sentral dan integritas ASEAN. Saat ini, ADMM-Plus telah berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan delapan "Negara Plus" diantaranya Australia, Tiongkok, India, Selandia Baru, Jepang, Rusia, Republik Korea, dan Amerika Serikat untuk

bertukar pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sebagai bagian dari usaha peningkatan kapasitas (Miknamara & Indra, 2024).

Persaingan antara AS dan China di kawasan Indo-Pasifik terpusat pada masalah keamanan laut, ekonomi, dan teknologi dengan AS memperjuangkan sistem yang berdasarkan aturan melalui kerjasama dalam kelompok kecil. QUAD (AS, Jepang, India, Australia) telah berkembang dari diskusi menjadi kolaborasi di berbagai bidang seperti pemahaman maritim dan teknologi penting. Sedangkan AUKUS (AS, Inggris, Australia) lebih menekankan pada kemampuan militer canggih, termasuk kapal selam nuklir untuk menghadapi tindakan agresif dari China (Juan et al., 2024). Pada kesepakatan AUKUS (perjanjian keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) telah menimbulkan kekhawatiran besar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sangat memperhatikan kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas di wilayah tersebut. Beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia dan Vietnam, juga menyatakan keprihatinan bahwa AUKUS bisa memperburuk ketegangan antara China dan kerangka keamanan yang dikuasai oleh AS. Vietnam memandang AUKUS dengan hati-hati sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap China, tetapi tetap waspada terhadap konsekuensi yang lebih luas bagi stabilitas regional dan kesatuan ASEAN. Dari sudut pandang Indonesia, AUKUS menyuguhkan suatu dilema strategis. Indonesia takut bahwa AUKUS bisa merusak mekanisme yang dikendalikan oleh ASEAN yang menekankan pentingnya netralitas dan non-blok. AUKUS juga memberikan tantangan bagi hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok, yang memerlukan pendekatan secara hati-hati untuk menghindari pergeseran lebih besar dalam ketegangan.

Selain itu, Indonesia menanggapi situasi ini dengan sangat hati-hati dan berusaha mempertahankan otonomi strategis sembari berkontribusi pada stabilitas di kawasan Asia-Pasifik (Silaen & Nurjanah, 2024).

Buku terbitan Deputi Sumber Daya Maritim pada tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 8.3 juta km², yang terdiri dari lautan seluas 6.4 juta km² (77%) dan daratan seluas 1.9 juta km² (23%), serta mencakup lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 100.000 km. Kondisi geografis seperti ini membuat Indonesia diakui sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia (Juan et al., 2024).

Wilayah Natuna dikenal sebagai salah satu daerah dengan simpanan minyak dan gas yang signifikan di Asia Tenggara. Terdapat sejumlah proyek utama diantaranya Lapangan Forel dan Terubuk dikelola oleh Medco E&P Natuna Ltd yang akan memulai produksi pada bulan Mei 2025 dengan kemampuan menghasilkan 20.000 barel minyak setiap hari serta 60 juta standar kaki kubik gas per harinya. Selain itu, Blok Anambas sedang dikembangkan oleh KUFPEC (*Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company*) telah disetujui dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,54 miliar yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2028. Adapun Natuna D-Alpha merupakan salah satu blok gas terbesar di dunia dengan cadangan sekitar 46 TCF (triliun kaki kubik), tetapi memiliki kadar CO₂ yang melebihi 70%, sehingga belum bisa dikembangkan secara maksimal akibat adanya hambatan dari segi teknologi dan biaya (Agnia et al., 2025).

Indonesia merupakan negara archipelago yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Negara ini tidak dapat terhindar dari persaingan pengaruh antara Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) dan

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diluncurkan oleh ASEAN +3 yang bersaing dengan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang dicetuskan oleh Amerika Serikat (Haerulloh & Martani, 2023). Hasil pemikiran awal menunjukkan bahwa "konsep geopolitik yang dikemukakan oleh Soekarno secara nyata telah terbukti menjadi dasar yang kuat dan juga sebagai sudut pandang alternatif dalam menciptakan tatanan dunia internasional yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta persahabatan antar negara demi perdamaian global " (Haerulloh & Martani, 2023).

Di mata China, Indonesia dipandang sebagai rekan yang krusial dalam BRI, dengan inisiatif-inisiatif seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan kolaborasi dalam sektor energi. Meski demikian, Indonesia tetap menolak klaim "Nine-Dash Line" dan menegaskan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekeliling Natuna. Sedangkan di mata Amerika Serikat, Indonesia dianggap sebagai kekuatan demokrasi terkemuka di Asia Tenggara, sebagai mitra strategis dalam keamanan laut dan inovasi digital serta kerja sama yang terjalin di sektor pertahanan, perubahan digital, dan pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia tidak memihak, melainkan mengutamakan kepentingan nasional serta kestabilan wilayah (Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, n.d., 2025).



Gambar 1.

Peta area Laut Natuna Utara menunjukkan adanya tumpang tindih

antara klaim *nine-dash line* Tiongkok dan ZEE milik Indonesia.

Sengketa di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok adalah salah satu masalah kelautan yang paling rumit di wilayah Asia Tenggara. Klaim sepihak yang diajukan oleh Tiongkok melalui istilah "Nine-Dash Line" menjadi penyebab utama muncul ketegangan di area tersebut. Dalam peta yang disebarluaskan oleh pemerintah Tiongkok, hampir seluruh kawasan Laut China Selatan, termasuk sebagian wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di bagian utara Natuna, diakui sebagai hak historis Tiongkok. Klaim ini jelas tidak memiliki dasar hukum yang valid karena bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang ditetapkan pada tahun 1982. Indonesia sebagai negara yang telah menyetujui UNCLOS lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memegang tanggung jawab hukum serta moral untuk melindungi integritas wilayah kedaulatannya. Namun dalam kenyataannya, pernyataan "hak historis" Tiongkok seringkali dipakai sebagai alasan politik untuk melakukan patroli bersenjata, penjagaan kapal nelayan, hingga kegiatan eksplorasi di area yang termasuk dalam ZEE Indonesia (Nur et al., 2026).

Penguatan kedudukan Indonesia terkait ZEE terlihat melalui regulasi dalam negeri pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengimplementasikan prinsip-prinsip UNCLOS. Undang-undang ini mengatur hak Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran seperti penangkapan ikan yang tidak sah, eksplorasi ilegal, atau survei tanpa izin. Kerangka hukum internasional yang mengatur lingkungan laut menawarkan

dasar tambahan bagi Indonesia. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut dalam Pasal 192–237 UNCLOS memberikan hak sekaligus tanggung jawab kepada negara pantai untuk memelihara kualitas lingkungan di ZEE-nya (Nur et al., 2026).

Dalam yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan kedaulatan dan hukum di laut berkaitan dengan kebijakan maritim yang ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Mengingat pemerintah masih kurang kuat dalam mengawasi kekayaan laut, negara belum dapat mengoptimalkan eksplorasi dan pengembangan maritim. Di sisi lain, sebagian besar kemajuan terlihat di sektor darat, yang berujung pada peningkatan ketimpangan pembangunan di seluruh wilayah. Sengketa mengenai studi kasus Laut Natuna dapat dituntaskan melalui dua pilihan, yakni secara damai dan kekerasan. Penyelesaian sengketa dengan cara damai dapat ditempuh dengan dua cara: 1) Penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui dua upaya yakni *adjudicatory* yaitu dengan Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) atau ITLOS (*International Tribunal for the Law of the Sea*) yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang berhubungan dengan pemahaman dan pelaksanaan Konvensi Hukum Laut PBB, dan *non-adjudicatory* yakni dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. 2) Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan yakni upaya yang dikenal sebagai resolusi non-damai, sebagai contoh Perang, aksi militer selain perang, pembalasan, sabotase, embargo, dan intervensi (Laksono & Fairuzzaman, 2024).

Studi Kasus

Respons Indonesia di Laut Natuna Utara

Laut Natuna Utara adalah salah satu daerah yang sangat penting karena

letaknya yang strategis. Ini adalah tempat di mana kepentingan Indonesia dan kepentingan negara lain di dunia bertemu. Kawasan ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sangat penting dalam jalur pelayaran internasional. Beberapa tahun terakhir, situasi di Laut Natuna Utara semakin tegang, terutama karena klaim Republik Rakyat Tiongkok yang tidak sesuai dengan hukum laut internasional. Klaim ini dikenal sebagai konsep *nine-dash line* dan bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh banyak negara, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS 1982. (Pelanggaran & Natuna, 2025)

Konflik Kepulauan Natuna berlangsung Sejak tahun 2016 an. Awal mula terjadinya konflik ini adalah lantaran adanya kapal ikan ilegal milik China yang masuk ke perairan Natuna pada bulan Maret 2016. Mengetahui hal ini pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, ketika aparat Indonesia menangkap kapal nelayan asing dari Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, situasi menjadi semakin panas. Insiden ini semakin memanas ketika kapal penjaga pantai Tiongkok mencoba mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Peristiwa ini menandai awal meningkatnya ketegangan antara kedua negara dalam melindungi kedaulatan maritim. Ini juga menunjukkan adanya praktik *grey zone conflict*, yaitu konflik yang tidak sampai pada perang terbuka tetapi masih menunjukkan tekanan strategis.

Konflik antara Indonesia dan Tiongkok kembali meningkat di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Konflik ini bermula dari insiden pada 19 Desember 2019. Saat itu, sejumlah kapal penangkap ikan asing milik Tiongkok memasuki wilayah tersebut untuk melakukan penangkapan

ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal ini semakin parah karena kapal *Coast Guard* Tiongkok juga memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Tindakan ini jelas melanggar kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Sejak 2019 hingga 2023, insiden ini bukanlah peristiwa tunggal. Banyak pelanggaran wilayah yang terjadi. Pemerintah Indonesia pun mengambil langkah tegas melalui dua jalur utama, yaitu penguatan militer dan jalur diplomasi. Kasus ini menunjukkan bahwa situasi di Laut Natuna Utara telah berubah. Kini, kasus-kasus di sana menjadi bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik. (Hukum & Islam, 2020)

Perkembangan terbaru dari 2024 hingga 2026 menunjukkan ketegangan di kawasan ini belum mereda, malah semakin meningkat karena gangguan pada aktivitas eksplorasi sumber daya energi Indonesia. Kapal penjaga pantai Tiongkok dilaporkan mengganggu survei migas yang dilakukan oleh Pertamina. Menanggapi hal ini, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melakukan operasi untuk mengusir dan mengawasi ketat kapal asing yang masuk ke wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan Laut Natuna Utara kini menjadi arena kontestasi, bukan hanya soal kedaulatan, tapi juga perebutan kontrol atas sumber daya energi. (Sulistiyani et al., 2021)

Strategi Indonesia

Dalam menghadapi dinamika tersebut, Indonesia menerapkan strategi yang bersifat multidimensional, mencakup aspek diplomatik, militer, dan ekonomi. Dari sisi diplomatik, Indonesia secara terus-menerus menolak klaim nine-dash line Tiongkok. Indonesia menegaskan posisinya berdasarkan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.

Dengan cara ini, Indonesia ingin mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Natuna. Indonesia juga berusaha untuk meredam konflik agar tidak meluas menjadi konfrontasi terbuka. (Hananya & Azzahra, 2017)

Dalam menjalankan strategi ini, Indonesia tetap menjaga hubungan bilateral yang stabil dengan Tiongkok. Tiongkok adalah mitra strategis yang penting dalam kemitraan ekonomi dan stabilitas regional ASEAN. Indonesia ingin memperkuat posisi tawarnya. Untuk itu, Indonesia secara aktif memperkuat peran regionalnya melalui inisiatif ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Inisiatif ini menekankan pada prinsip inklusivitas, kerja sama, dan stabilitas. Indonesia tidak berpihak pada kekuatan besar tertentu.

Namun, Indonesia juga menjajaki sinergi strategis melalui kerangka kerja sama QUAD+. Ini adalah upaya untuk diversifikasi dukungan internasional. Dengan cara ini, Indonesia ingin menciptakan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Seluruh pendekatan ini mencerminkan pengejawantahan politik luar negeri Bebas Aktif. Indonesia bermanuver di antara kepentingan kekuatan besar. Indonesia ingin memastikan kedaulatan di Natuna tetap terjaga, serta Indonesia ingin memelihara perdamaian kawasan.

Dari sisi pertahanan, Indonesia melakukan pembenahan kapasitas militer dengan memperbarui alat utama sistem persenjataan dan memperkuat keamanan di daerah perbatasan. Tujuannya adalah untuk membuat efek yang dapat mencegah pelanggaran kedaulatan tanpa harus memicu konflik bersenjata yang lebih besar. Untuk mencapai hal ini, Indonesia membeli kapal fregat, sistem radar, dan meningkatkan patroli di perairan Natuna. (Pertahanan, n.d.)

Selain itu, TNI juga meningkatkan kemampuan teknologi dan memperbanyak

kehadiran personel dan armada tempur di lapangan. Berikut beberapa contoh penguatan kekuatan TNI di Kepulauan Natuna:

- a. Pangkalan Udara Strategis: Membangun infrastruktur untuk mempersiapkan jet tempur Sukhoi Su-27.
- b. Kekuatan Udara Taktis: Menyiapkan empat unit helikopter serbu AH-64E Apache untuk mendukung mobilitas dan pertahanan udara.
- c. Penguatan Pasukan Darat: Menambah satu batalion infanteri dari Kodam I/Bukit Barisan untuk memperketat pengamanan wilayah darat.
- d. Patroli Udara Rutin: Meningkatkan frekuensi patroli wilayah oleh skuadron jet tempur dari Pekanbaru.
- e. Kehadiran Maritim: Mengirim puluhan kapal perang tambahan dari Komando Armada Barat TNI AL untuk menjaga kedaulatan di perairan ZEE.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa selain menggunakan diplomasi, negara juga sangat serius dalam menunjukkan kesiapan militer untuk menjaga wilayah kedaulatannya di Laut Natuna Utara.

Indonesia memiliki beberapa cara untuk menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara. Strategi Indonesia untuk menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara berfokus pada aktivitas ekonomi yang kuat, selain kekuatan militer dan diplomasi. Indonesia ingin memanfaatkan cadangan gas alam yang besar di kawasan tersebut untuk memperkuat posisinya dalam hukum internasional.

Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan konsumsi energi, sehingga Indonesia harus meningkatkan cadangan sumber energi fosil melalui eksplorasi dan eksploitasi di daratan dan lepas pantai.

Jika tidak, Indonesia berisiko menghadapi krisis energi dan ketergantungan pada impor minyak dan gas dari luar negeri.

Namun, upaya meningkatkan produksi energi di Natuna tekanan eksternal, seperti gangguan terhadap kegiatan survei migas oleh kapal asing. Indonesia harus mempertahankan hak berdaulatnya sambil menjaga hubungan baik dengan mitra dagang terbesarnya.

Kondisi ini membutuhkan kebijakan yang hati-hati agar eksplorasi sumber daya tidak memicu konflik yang merugikan stabilitas ekonomi. Indonesia juga memperkuat kehadiran sipil melalui sektor perikanan dan menjalankan diplomasi ekonomi melalui ASEAN. Langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas kawasan yang memungkinkan Indonesia meningkatkan cadangan energi fosil tanpa memicu konflik terbuka. Pada akhirnya, keberhasilan strategi ekonomi Indonesia di Laut Natuna Utara bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan kebutuhan energi dan dinamika geopolitik di wilayah perbatasan. (Firdaus et al., 2023)

Pemerintah harus bijak dalam membuat keputusan untuk meningkatkan produksi energi di Natuna. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatannya sambil bekerja sama dengan negara lain. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai kemandirian energi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan strategi ini juga bergantung pada kemampuan Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Indonesia harus mampu menunjukkan kekuatan dan keteguhan dalam menjaga kedaulatannya. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan stabil di kawasan. (Indriyani et al., 2022)

Faktor Pendorong Dinamika Geopolitik di Laut Natuna Utara

Dinamika geopolitik di Laut Natuna Utara sangat dipengaruhi oleh interaksi

antara faktor domestik dan eksternal yang membentuk perilaku strategis Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar. Dalam rivalitas global di kawasan Indo-Pasifik, terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia cenderung mengadopsi strategi penyeimbangan yang fleksibel. Strategi ini bukan berarti keberpihakan terhadap salah satu kekuatan, melainkan upaya untuk menjaga otonomi strategis sekaligus memaksimalkan kepentingan nasional.

Indonesia menerapkan strategi *balancing act* dalam kebijakan luar negerinya. Di satu sisi, Indonesia memperkuat kerja sama keamanan dengan mitra-mitra strategis. Namun, di sisi lain, Indonesia tetap menjaga hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok. Indonesia tidak secara eksplisit bergabung dalam aliansi militer tertentu. Akan tetapi, Indonesia tetap membuka ruang kerja sama dalam kerangka yang lebih inklusif, seperti melalui penguatan peran ASEAN dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya memainkan peran sebagai negara dengan pengaruh sedang yang mampu menjadi penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar. (Veronika et al., 2026)

Rivalitas ekonomi global, terutama perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga mempengaruhi dinamika di Laut Natuna Utara. Ketegangan ekonomi antara kedua negara tersebut meningkatkan kompetisi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan penguasaan rantai pasok global. Dampaknya bagi Indonesia bersifat ambivalen. Indonesia memperoleh peluang dari relokasi industri dan diversifikasi rantai pasok global. Namun, ketegangan tersebut juga meningkatkan tekanan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, termasuk di Laut Natuna Utara.

Laut Natuna Utara menjadi ruang strategis yang diperebutkan secara militer, ekonomi, dan politik. Sumber daya alam yang melimpah, terutama gas alam, serta posisinya sebagai jalur pelayaran internasional menjadikan kawasan ini titik krusial dalam peta geopolitik regional. Dinamika yang terjadi di kawasan ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut. (Birgitta et al., 2025)

Analisis SWOT Geopolitik Indonesia di Laut Natuna Utara

Untuk memahami situasi Indonesia dengan lebih baik, kita dapat menggunakan analisis SWOT. Ini adalah cara untuk mengevaluasi strategi kita di Laut Natuna Utara.

Pertama, mari kita lihat kekuatan Indonesia. Indonesia memiliki hak hukum internasional yang kuat atas Laut Natuna Utara berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Ini memberikan kita dasar yang kuat untuk menolak klaim Tiongkok. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat kita memiliki keunggulan dalam mengontrol jalur pelayaran internasional. Indonesia juga memiliki banyak sumber daya alam, terutama di sektor perikanan dan energi, yang dapat membantu kita memperkuat ekonomi.

Namun, Indonesia juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan kita adalah kapasitas militer dan pengawasan maritim yang terbatas dibandingkan dengan Tiongkok. Tiongkok memiliki angkatan laut dan penjaga pantai yang jauh lebih besar. Selain itu, kita masih memiliki kesulitan dalam koordinasi antar lembaga untuk mengelola keamanan maritim, yang dapat membuat kita kurang efektif dalam menanggapi pelanggaran wilayah. Kita juga sangat tergantung pada Tiongkok dalam hal ekonomi, yang dapat membatasi

kemampuan kita untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas.

Di sisi lain, ada beberapa peluang yang dapat kita manfaatkan. Meningkatnya perhatian global terhadap kawasan Indo-Pasifik memberikan kita kesempatan untuk memperkuat peran kita sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas regional. Kita dapat menggunakan posisi kita dalam ASEAN untuk mendorong kerja sama multilateral yang berbasis pada hukum internasional. Selain itu, kita dapat mengembangkan sumber daya energi di Natuna untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan memperkuat posisi kita dalam hubungan internasional.

Namun, kita juga menghadapi beberapa ancaman. Tiongkok terus meningkatkan tekanan terhadap kita melalui kehadiran kapal nelayan dan penjaga pantai di wilayah ZEE. Ini tidak hanya merupakan ancaman militer, tetapi juga ekonomi dan politik. Selain itu, rivalitas antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik dapat menyeret kita ke dalam konflik yang lebih luas. Lemahnya kohesi di antara negara-negara ASEAN dalam menyikapi isu Laut Tiongkok Selatan juga merupakan tantangan tambahan yang dapat mengurangi efektivitas upaya kita. (Utara & Manuver, 2025)

Secara keseluruhan, situasi Indonesia di Laut Natuna Utara sangat kompleks. Kita harus menggunakan kekuatan dan peluang yang kita miliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Strategi kita harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan geopolitik yang cepat.

Tabel 1 Analisis SWOT Geopolitik Indonesia di Laut Natuna Utara

SWOT	Strengths	Weaknesses
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki hak hukum internasional berdasarkan Konvensi PBB 1982 Letak 	<ol style="list-style-type: none"> Kapasitas militer dan pengawasan maritim terbatas Koordinasi antar

	geografis strategis sebagai negara kepulauan terbesar 3. Kaya akan sumber daya alam	lembaga belum optimal 3. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok
SWOT	Oppertunities	Threats
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya perhatian global terhadap kawasan Indo-Pasifik Peluang memperkuat peran dalam ASEAN Kerja sama multilateral berbasis hukum Internasional Pengembangan sumber daya energi Natuna 	<ol style="list-style-type: none"> Tekanan terhadap kehadiran kapal nelayan dan penjaga pantai di wilayah ZEE Lemahnya kohesi di antara negara ASEAN Potensi konflik regional lebih luas

D. Simpulan

Dinamika *geopolitik* di Kawasan Indo-Pasifik, terkhusus di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam posisi strategis akibat adanya persaingan kekuatan besar antara AS dan Tiongkok, serta terjadinya tumpang tindih kepentingan ekonomi, keamanan dan hukum internasional. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis, Indonesia memiliki kekuatan utama pada legitimasi hukum internasional, posisi geografis dan potensi sumber daya alam. Namun, Indonesia dihadapkan dengan adanya keterbatasan kapasitas maritim, koordinasi antar Lembaga, serta ketergantungan ekonomi. Pembaharuan kajian ini terletak pada penegasan bahwa strategi Indonesia tidak hanya berfokus pada pendekatan militer semata. Tetapi mengepankan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan

diplomasi hukum, penguatan pertahanan dan keamanan, serta optimalisasi ekonomi energi sebagai instrumen *geopolitik* untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif serta melakukan penyeimbangan, Indonesia berhasil mempertahankan otonomi strategis tanpa terperangkap dalam kekuatan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan pengawasan laut, mempercepat pengembangan teknologi untuk eksplorasi energi di Natuna, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga, sambil memperkuat peran ASEAN sebagai fondasi stabilitas kawasan. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi strategi ekonomi dan keamanan maritim berbasis teknologi, serta pengaruh jangka panjang dari rivalitas global terhadap ketahanan energi dan kedaulatan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agnia, S., Mulyanie, E., Studi, P., Geografi, P., Keguruan, F., & Pendidikan, I. (2025). *Potensi Maritim Indonesia: Analisis Potensi Sumber Daya Alam Natuna*. 11(2), 2025.
- Birgitta, E., Internasional, J. H., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, U. (2025). *STRATEGI HEDGING INDONESIA DALAM MERESPONS DINAMIKA AUKUS VERSUS CHINA*.
- Firdaus, M. W., Yanto, A., Firdaus, M. W., Yanto, A., Hikmah, F., & Nugroho, S. (2023). *Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara*. 8, 277–291.
- Haerulloh, A., & Martani, R. (2023). Analisis Geopolitik Abad 21 di Indo-Pasifik dan Persiapan Indonesia dalam Menyikapi Konflik di Laut Cina Selatan. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(3), 187–201.
- Hananya, K. A., & Azzahra, F. S. (2017). Indonesia sebagai Kekuatan Menengah: Komparasi Respon Indonesia terhadap Illegal Fishing dan Laut Tiongkok Selatan., 2.
- Faindatul Muslimah¹, Wazi'atus Santiyah², Depict Pristine Adi³ (2020). *Al-Ahkam Al-Ahkam*. 2(2), 87–96.
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M. I., & Uksan, A. (2022). *Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan : Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna*. 16, 29–42.
- Juan, H., Tasya, A., & Josephine, M. (2024). Peran ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dalam Mengukuhkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Transformasi Global*, 11(2).
- Laksono, M. P., & Fairuzzaman, F. (2024). Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Simbur Cahaya*, XXXI(1), 70–85. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3318>
- Miknamara, J. S. K., & Indra, I. (2024). Peran Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Kawasan Regional Asean di Tengah Perebutan Pengaruh Negara-Negara Great Power. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3741–3751. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1528>
- Nur, M., Al, K., Hidayat, R. A., Rizky, M., Fatmawati, A., & Farida, A. (2026). *Ketegangan Kedaulatan dan Kepatuhan Internasional dalam Sengketa Laut Natuna Utara Perspektif Hukum Internasional (UNCLOS 1982)*. 3886–3898.
- Achmad S., Ardian B. D., Wisnu S., Mochamad A., Juli H. (2025). *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*. September, 218–231.
- Wahyuni Sri, (2019). *STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KLAIM TRADITIONAL FISHING GROUND EKSLUSIF INDONESIA*.
- Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, P. (n.d.). *Rudy C Tarumingkeng : Geopolitik Baru Asia Tenggara - Antara China , Amerika , dan ASEAN Oleh : Bogor , Indonesia*.
- Sandrina Dewi, & Wira Atman. (2025). Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok. *Jurnal*

- Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 156–173.
<https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.492>
- Sasono, W. (2026). *DINAMIKA ANCAMAN DAN RESPON PERTAHANAN DI LAUT NATUNA UTARA : STUDI KUALITATIF STRATEGI TNI AL DALAM MENJAGA ZONA PERBATASAN Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut , Indonesia Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis Indonesia yang kaya akan sumber d. 26, 282–300.*
<https://doi.org/10.33556/jstm.v26i2.495>
- Silaen, C. A. M., & Nurjanah, I. (2024). AUKUS-RI: The Answer for Indonesia's Future Maritime Challenges Over the North Natuna Sea? *Jurnal Lemhannas RI*, 12(3), 261–276.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.910>
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). *Indonesia ' s Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo ' s Admininstration Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko.* 84–101.
<https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Utara, N., & Manuver, S. (2025). *Nirwana P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625.* 2337, 815–831.
- Veronika, Y., Sriyati, P., Balawanga, M., & Subandi, Y. (2026). *Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Merespons Sengketa Maritim di Laut Natuna Utara dengan Tiongkok (2019 – 2020).* 221–228.
- Villia, L. G., Kaka, A. S., & Subandi, Y. (2026). *Dampak Konflik Laut Natuna Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Indonesia Pada Tahun 2021 – 2023.* 94–101.
- Wanditadiva, S. (2025). Ambiguitas DiplomatiK dan Ketahanan Maritim Indonesia: Analisis Geopolitik Pernyataan Bersama Prabowo-Xi Jinping dalam Konteks Laut Cina Selatan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 31(2), 181.
<https://doi.org/10.22146/jkn.109197>